

PELAYANAN KB SERENTAK HUT IBI KE-74 & IDM 2025: KOLABORASI IBI-BKKBN TINGKATKAN AKSES KONTRASEPSI DI PEKANBARU

Karmina Dewi¹, Ary Oktora Sri Rahayu³, Fatma Nadia³, Yesi Septina Wati⁴, Meirita Herawati⁵, Nia Desriva⁶, Yeni Susilawati⁷, Yanti Nida⁸

^{1,7,8} Ikatan Bidan Indonesia, ^{2,3,4,5,6} Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah

Received: 7 Juli 2025 | Revised: 11 Juli 2025 | Accepted: 14 Juli 2025

Corresponding Author: Karmina Dewi

Abstrak

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya penting dalam menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan dan mendukung program pembangunan keluarga. Keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan KB melalui kegiatan pelayanan serentak yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bekerja sama dengan BKKBN. Metode yang digunakan adalah kegiatan pelayanan langsung dan penyuluhan kepada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja Puskesmas Tenayan Raya, Pekanbaru yang dimulai pada tanggal 5 Mei sampai 31 Mei 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah akseptor baru, khususnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Tantangan berupa keraguan peserta terhadap kontrasepsi berhasil diatasi melalui konseling interpersonal oleh bidan. Kegiatan ini menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam penguatan program KB nasional.

Kata kunci: Keluarga Berencana, Bidan, BKKBN, Akseptor KB

1. PENDAHULUAN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang BKKBN. Dalam peraturan tersebut, BKKBN memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengendalian kependudukan serta penyelenggaraan program keluarga berencana secara terintegrasi dan berkelanjutan (IBI, 2025). Pelayanan KB, tidak bisa terlepas dari peran bidan sebagai salah satu pemberi layanan KB. Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan organisasi profesi yang mewadahi para bidan di Indonesia, dengan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta mendukung program-program kesehatan nasional, termasuk program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. dari tenaga bidan yang berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan keberadaan bidan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, IBI memiliki kapasitas untuk menjangkau dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya pelayanan KB (IBI, 2025).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran IBI serta untuk meningkatkan kerjasama yang telah terlaksana, maka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) IBI ke-74, serta memperkuat komitmen profesi kebidanan terhadap kesehatan reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak. Pada kegiatan ini, akan dilaksanakan pelayanan KB semua metode terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta KB Pasca Persalinan (KBPP). KB Pasca Persalinan adalah metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pada masa pascapersalinan (setelah 42 hari) bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran anak serta menjaga kesehatan ibu secara optimal. Keluarga Berencana Pascapersalinan

(KBPP) memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan dan perlindungan kesehatan reproduksi ibu setelah melahirkan. Pelayanan KBPP juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan dalam waktu yang terlalu singkat setelah persalinan, sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan baik bagi ibu maupun bayi (IBI, 2025)

Sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tingkat nasional tahun 2018, tercatat bahwa sebesar 59,3% perempuan usia 15–49 tahun yang berstatus menikah (Pasangan Usia Subur/PUS) menggunakan metode kontrasepsi modern. Dari jumlah tersebut, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan meliputi suntik (48,5%), pil KB (8,5%), implan (4,7%), IUD (6,6%), kondom (1,1%), Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 3,1%, dan Metode Operasi Pria (MOP) sebesar 0,2%. Sementara itu, berdasarkan Riskesdas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), metode kontrasepsi yang dominan digunakan oleh akseptor KB adalah suntik (55,1%), diikuti oleh implan (8,54%), IUD (7,33%), pil KB (3,64%), kondom (0,28%), MOW (1,28%), dan MOP (0,08%). Data ini menunjukkan bahwa metode kontrasepsi suntik masih menjadi pilihan utama di kalangan peserta KB baru, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Pada tahun 2014 hingga 2015, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai sekitar tiga juta jiwa per tahun (Zuhriyah et al., 2017). Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 244.775.797 jiwa berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (Ernawati, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka kelahiran pada masa sebelumnya. (Muhathiah, 2012). Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat ledakan jumlah penduduk. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan, khususnya dalam hal penyediaan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1968, melalui pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang kemudian berkembang menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Gerakan Keluarga Berencana Nasional ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan keluarga yang lebih baik (Pemerintah RI, 2014).

Menurut Miller (2014), program keluarga berencana merupakan intervensi yang secara kuantitatif sederhana namun memiliki makna yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Sementara itu, Sari (2020) menyatakan bahwa program KB melalui penggunaan kontrasepsi memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan ibu, bayi, dan anak, serta mendukung kesehatan reproduksi dan seksual, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Meskipun masyarakat sangat dianjurkan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), angka putus pakai kontrasepsi justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2002 angka putus KB tercatat sebesar 21%, meningkat menjadi 26% pada tahun 2007, 27% pada tahun 2012, dan mencapai 29% pada tahun 2017 (Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Beragam jenis metode kontrasepsi dapat digunakan oleh akseptor Keluarga Berencana (KB), antara lain Intrauterine Device (IUD), implan, suntikan, kondom, kontrasepsi oral (pil), serta metode operatif, baik untuk wanita (tubektomi) maupun pria (vasektomi). Masing-masing metode memiliki kelebihan dan indikasi penggunaan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan individu. (Puspita R, 2022). Berdasarkan data pemutakhiran PK24 Provinsi Riau Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan MKJP (IUD), Implan, MOW dan MOP) di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,9% dibandingkan tahun 202. Sedangkan target pencapaian IKK tahun 2025 untuk KBPP adalah 57%. Oleh karena itu, melalui kegiatan Pelayanan KB Serentak kali ini, diharapkan dapat meningkatkan capaian PUS yang menggunakan MKJP serta percepatan peningkatan pencapaian KBPP (IBI, 2025)

Partisipasi aktif masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) sangat dipengaruhi oleh tingkat kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS), khususnya Wanita Usia Subur (WUS). Program KB memberikan

solusi yang efektif dalam mengatur jarak kehamilan serta rentang usia antar anak, sehingga mendukung perencanaan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera. Selain itu, penggunaan metode kontrasepsi secara tepat juga berkontribusi dalam menurunkan risiko terhadap penyakit seperti kanker rahim dan kanker serviks, serta dapat mengurangi angka kematian ibu. Secara lebih luas, keberhasilan pelaksanaan program KB turut berperan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Norazizah et al., 2019).

Program Keluarga Berencana memberikan peluang bagi pasangan usia subur untuk mengatur jarak kelahiran atau menurunkan jumlah kelahiran melalui pemanfaatan berbagai metode kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal. Upaya ini bersifat sementara namun strategis dalam mendukung perencanaan keluarga yang sehat dan terencana. Melalui pelaksanaan program KB, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, sekaligus berkontribusi dalam upaya pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Di samping itu KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB, meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui Pendekatan kebijakan kependudukan yang terpadu merupakan strategi penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan (Nadia. F, 2020)

2. METODE

Jenis kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pelayanan langsung dan edukasi kesehatan, yang dilaksanakan pada tanggal 5–31 Mei 2025 di Puskesmas Tenayan Raya, Pekanbaru dengan Peserta Wanita Usia Subur (WUS), kader kesehatan, dan tim medis (bidan, BKKBN). Adapun metode kegiatan yang di laksanakan dalam bentuk Pelayanan kontrasepsi, suntik KB, pil KB, implan, dan IUD, Edukasi dan penyuluhan penyampaian manfaat KB dan klarifikasi mitos Konseling personal untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan terhadap MKJP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berhasil menjaring puluhan akseptor baru, terutama pengguna metode kontrasepsi jangka panjang. Pelayanan diberikan secara menyeluruh dan gratis kepada masyarakat sasaran. temuan utama dalam kegiatan ini diantaranya adalah, peningkatan jumlah akseptor baru, terutama IUD dan Implan, Masih ditemukan keraguan masyarakat terhadap efek samping kontrasepsi, Intervensi efektif melalui konseling interpersonal sudah dilakukan.

Kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kepercayaan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh mitos seputar alat kontrasepsi, seperti ketakutan terhadap efek infertilitas. Namun hal ini berhasil ditangani melalui edukasi yang dilakukan oleh bidan secara langsung dengan pendekatan empatik dan komunikatif.

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan



4. KESIMPULAN

Kegiatan pelayanan KB serentak ini berhasil meningkatkan cakupan kontrasepsi, terutama di daerah dengan kebutuhan tinggi. Kolaborasi antara IBI dan BKKBN terbukti efektif dalam memperluas akses serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Edukasi dan konseling tetap menjadi kunci dalam mengatasi hambatan kultural dan mitos yang berkembang.

5. REFERENSI

- [1] Anggarini, D. D., dkk. (2021). *Pelayanan kontrasepsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- [2] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Pedoman pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka Hari Keluarga Nasional*. Jakarta: BKKBN.
- [3] Dewi, P. H. 2014. Rendahnya Keikutsertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Pasangan Usia Sub
- [4] Gustikawati, D.A. 2014. Faktor Pendukung dan Penghambat Istri PUS dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Implant di Puskesmas 1 Denpasar Utara.
- [5] IBI. (2025). *Pedoman Bulan Bhakti IBI HUT IBI ke-74 dan IDM*.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI .2019. LAPORAN NASIONAL RISKESDAS 2018. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- [6] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- [7] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Provinsi Nusa Tenggara Barat Riskesdas 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- [8] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- [9] Miller, S. (2014). *Family Planning and Its Impact on Socioeconomic Development*. New York: Population Council
- [10] Muhatiah, R. (2012). Partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.502>
- [11] Nadia, F, Oktora, A. (2020) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Yogyakarta : Gosyen Publishing
- [12] Norazizah, N., et al. (2019). *Keaktifan masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana dan dampaknya terhadap kesehatan dan pembangunan manusia*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 125-136.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316
- [14] Sari, N. M. (2020). *Manfaat Program Keluarga Berencana terhadap Kesehatan Reproduksi dan Ketahanan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Medika
- [15] Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Raharjo, B. B. (2017). Kampung Keluarga Berencana dalam peningkatan efektivitas program Keluarga Berencana. *HIGEIA: Journal of Public Health Research and Development*, 1(4), 1–13. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>